

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. (2018). *Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Aceh* (Doctoral dissertation, IPB (Bogor Agricultural University)).
- Agustinus, J. (2020). Kinerja Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Provinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 9(4), 1304-1321.
- Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap PDRB Di Kab/Kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu EKonomi JIE*, 2(1), 1-13.
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. “*Penelaahan Atas Dana Otonomi Khusus Aceh*”. 2020. <https://www.dpr.go.id>
- Budiratna, H., & Qibthiyah, R. M. (2020). Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 402-414.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang. “*Gambaran umum Kabupaten Aceh Tamiang*”. 2021. <https://dinkes.acehtamiangkab.go.id/profil/gambaran-umum.html>
- Hartati, C. S., Abdullah, S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh penerimaan dana otonomi khusus dan tambahan dana bagi hasil migas terhadap belanja modal serta dampaknya pada indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2).
- Junaedi, A. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(2), 183-199.
- Khairudin, K., & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2).
- NEGARA, P. K. A. K., & RI, B. K. D. Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang *Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus*
- PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang *Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus*
- PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
- PSAP 12 tentang Laporan Operasional
- Putra, I., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), 1-14.
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Syafira, S. (2019). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(2), 126-138.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
- Yuanita, D. W. (2021). Analisis Perwujudan Good Governance Melalui Akuntabilitas Publik Dan Meminimalkan Perilaku Oportunistik Di Dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah. *Salam Islamic Economics Journal*, 2(1), 21-41.